

ISBN : 978-979-8389-18-4

B-22



# PROSIDING

## SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT TAHUNAN DEKAN

Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian  
Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri  
(BKS-PTN) Wilayah Barat

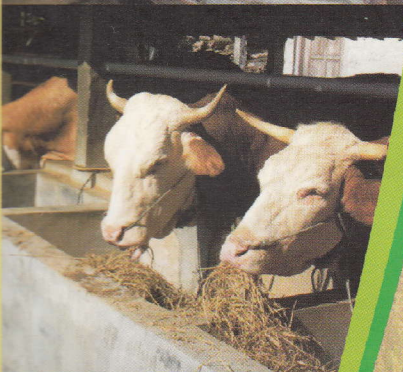
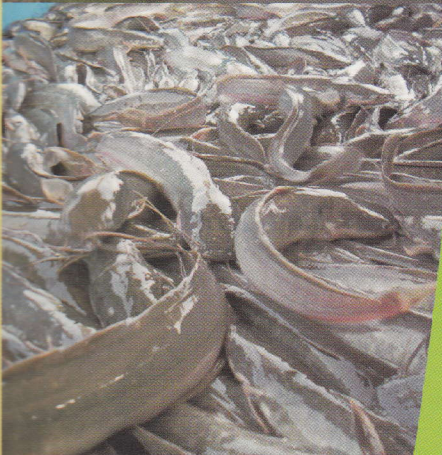
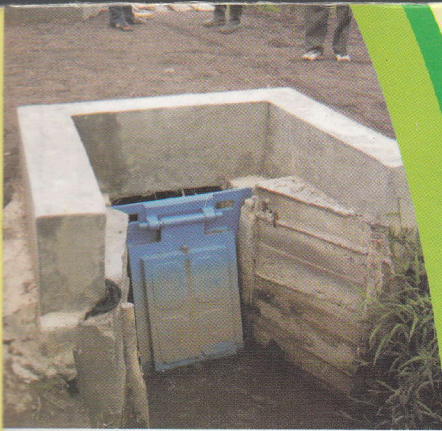
### *VOLUME III*

TEMA :

PERAN IPTEK UNTUK MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM  
DALAM PERSPEKTIF PERTANIAN BERKELANJUTAN

FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG, 23 - 25 MEI 2011





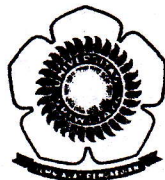
# **PROSIDING**

**SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT TAHUNAN DEKAN  
Bidang ilmu-ilmu Pertanian Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri  
(BKS-PTN) Wilayah Barat**

**Tema :**

**PERAN IPTEK UNTUK MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM DALAM  
PRESPEKTIF PERTANIAN BERKELANJUTAN**

**VOLUME 3**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG, 23-25 MEI 2011**



**Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN RAPAT TAHUNAN DEKAN  
Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat**

**Volume 3**

Badan Penerbitan Fakultas Unsri, 2011  
601 halaman, ukuran A4

ISBN : 978-979-8389-18-4

**Tim Penyunting :**

Arfan Abrar  
Gatot Muslim  
Elly Rosana  
Thirtawati  
Selly Oktarina  
Hilda Agustina  
Desi Aryani

Desain Sampul : Arfan Abrar  
Tata Letak Isi : Arfan Abrar

**Undang-Undang No.19 Tahun 2002  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1997  
Pasal 44 tentang Hak Cipta**

**Pasal 72**

1. Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjualkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil penyelenggaraan Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



## DAFTAR ISI

### AGRI-BISNIS

KARAKTERISTIK PERSONAL PETANI DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA DAN KINERJA KELOMPOK TANI <i>A.D. Murtado</i> .....	1
ANALISIS KESANGGUPAN MEMBAYAR IPAIR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PERTANIAN PASANG SURUT <i>Muhammad Yazid</i> .....	10
ANALISA KEUNTUNGAN DAN DAYA SAING KOMPETITIF DAN KOMPARATIF KOMIDITI LOBSTER DI PROVINSI BENGKULU: APLIKASI MODEL PAM <i>Kenat Sukiyono</i> .....	17
PENGARUH HARGA MINYAK SAWIT INTERNASIONAL DAN RENDEMEN MINYAK SAWIT TERHADAP NILAI INDEKS K DI SUMATERA SELATAN <i>Andy Mulyana, Nasir Dan Riswani</i> .....	25
PERUBAHAN HARGA POKOK TBS SEBELUM DAN SETELAH PENURUNAN HARGA MINYAK SAWIT DUNIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN USAHATANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR <i>Lifianthi dan Maryati Mustopa Hakim</i> .....	35
TRANSMISI HARGA MINYAK SAWIT DUNIA PADA HARGA MINYAK SAWIT LOKAL, HARGA TBS DAN MARGIN HARGA DI SUMATERA SELATAN <i>Andy Mulyana, Riswani, dan Nasir</i> .....	47
PERBANDINGAN PENDAPATAN ANTARA KEGIATAN USAHA HERBASIS LAHAN DENGAN NON LAHAN RENDAH KARBON DI LAHAN GAMBUT SEKITAR PERUSAHAAN HTI <i>Najib Asmani</i> .....	59
ANALISIS PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA DENGAN PLASMA DI SUMATERA SELATAN <i>Mirza Antoni</i> .....	65
STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN PEMASARAN PEMPEK DI SUMATERA SELATAN <i>Railia Karneta</i> .....	77
HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU PETANI DENGAN PERSEPSINYA TERHADAP KINERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA OGAN ILIR <i>Sriati, Selly Oktarina dan Rangga Akbar Tyansan</i> .....	85
ECONOMIC EFFICIENCY OF CASSAVA FARMING IN LAMPUNG PROVINCE <i>Wan Abbas Zakaria</i> .....	93
MOTIVASI SEBAGAI ALTERNATIF FAKTOR KEBERHASILAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA <i>Suhernan</i> .....	110



## ANALISA KEUNTUNGAN DAN DAYA SAING KOMPETITIF DAN KOMPARATIF KOMIDITI LOBSTER DI PROVINSI BENGKULU: APLIKASI MODEL PAM

Ketut Sukiyono

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

### ABSTRACT

*This research is aimed at analyzing profitability, comparative and competitiveness advantages of lobster in Province Bengkulu as well as examining the impact of government intervention on Lobster industries. Model of Policy Analysis Matrix (PAM) is used to achieve goals aforementioned. The research shows that lobster commodity is profitable both financially and economically as shown by its private and social profitability value. The research also find that this commodity has high competitive and comparative advantages as indicated by its value of PCR and DCR. Meanwhile, the government of Indonesia doesnot enough protection on lobster price eventhough the fishermen has enjoy GOI intervention on input price especally on fuel price. It is recomendated that fishermen should not over-fish in order to sustain lobster availability both in size and number.*

*Key-words: Lobster, PAM Model, profitability, competitive and comparative advantages*

### PENDAHULUAN

Subsektor perikanan, khususnya perikanan tangkap, memiliki peranan sangat strategis bagi perekonomian Propinsi Bengkulu. Dengan luas wilayah 1.978,870 km<sup>2</sup> ini, hampir seluruh daerah provinsi ini terdapat pesisir pantai. Diperkirakan panjang garis pantai mencapai 525 km yang membentang ke arah laut lepas (ZEE 200 mil) dengan tingkat pemanfaatan ikan laut mencapai 42.786,6 ton pada tahun 2007. Sementara peluang penangkapan ikan tersebut mencapai 94.310,4 ton per tahun (74,72%) (BPS 2008). Sementara itu, jenis ikan yang dapat dikonsumsi dari perairan Bengkulu antara lain ikan tuna besar, cakalang, tongkol, tenggiri, sentuhuk, pedang, layaran, pelagis kecil, demersal, udang penaeide, lobster, cumi-cumi, serta ikan karang.

Potensi laut yang cukup besar tersebut, subsektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi semakin penting. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Apabila dibandingkan dengan potensi lautnya yang memiliki garis pantai lebih kurang 525 km, maka produksi ikan laut yang dihasilkan para nelayan Provinsi Bengkulu tersebut tergolong rendah. Kondisi itu menyebabkan kontribusi subsektor perikanan (perikanan darat dan perikanan laut) dalam perekonomian Provinsi Bengkulu tidak terlalu menonjol. Pada kurun waktu 2000-2007 kontribusi subsektor perikanan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu kurang dari 5 persen per tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan pertumbuhan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup baik sebesar 5,24 persen kurun waktu 2002 – 2005. Masih kecilnya kontribusi ini salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan potensi masih belum optimal mengingat potensi lestari sumberdaya ikan jauh lebih besar dari tingkat pemanafatan yang ada saat ini.(BPS 2008)

Saat ini jenis ikan yang ditangkap merupakan komoditas yang bernilai tinggi baik di pasar lokal/domestik maupun di pasar ekspor dan salah satu jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang merupakan kelompok crustacea yaitu udang barong atau lebih dikenal dengan *lobster*. Prospek permintaan lobster ke depan semakin besar sehingga perlu peningkatan produksinya, permasalahannya adalah lobster di Bengkulu berasal dari perikanan tangkap (DKP Bengkulu 2005). Peningkatan jumlah tangkapan perlu dilakukan



juga didukung oleh perkembangan harga nominal lobster dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Namun demikian, data yang ada juga menunjukkan bahwa produksi tangkapan lobster selama kurun waktu 2001 – 2005 mempunyai kecenderungan tren penurunan, sementara produksi lobster melalui budidaya belum berkembang.

Lobster seperti produk perikanan lainnya sangat mudah rusak (*perishable*). Oleh sebab itu, lobster harus dijaga dari kerusakan selama proses produksi sampai dijual ke konsumen. Hal ini membutuhkan pola pemasaran dengan sistem rantai dingin (*cold chain*) antara lain dengan membangun peralatan pendingin pada setiap jalur pemasaran. Lebih lanjut, lobster merupakan produk ekspor, sehingga pasar lobster dikarakterisasikan sebagai pasar yang banyak para pelakunya. Rantai pemasaran lobster dapat terdiri dari para suplier, processor dan distributor produk perikanan. Para pelaku di pasar ikan ini seringkali menetapkan peraturan dan sistem operasional yang berbeda. Akibatnya perdagangan lobster harus melalui saluran perdagangan yang berbeda sebelum sampai pada tujuan akhir mereka.

Pelaku usaha yang menghadapi rantai pemasaran lobster yang panjang dan besar ini harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen yang lokasinya relatif jauh, misalnya Lampung dan Jakarta. Persoalan rantai pemasaran lobster mulai dari penangkapan lobster di tingkat nelayan menghadapi tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi karena pengaruh iklim serta pemasaran ke luar daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada besarnya biaya produksi dan pemasaran. Biaya yang sangat besar akan menyebabkan daya saing lobster asal Bengkulu diduga menjadi tidak kompetitif. Disisi lain ketidakstabilan harga lobster di pasar domestik di Jakarta dan pasar dunia di Cina dan Jepang menambah besar tingkat persaingan usaha lobster.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian untuk mengetahui daya saing komoditi lobster Bengkulu dan melihat dampak kebijakan harga input dan output terhadap sistem usaha penangkapan lobster.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis daya saing komoditi lobster Bengkulu adalah dengan menggunakan metode analisis *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil analisis PAM memberikan gambaran informasi tentang profitabilitas daya saing (keunggulan kompetitif), efisiensi ekonomi (keunggulan komparatif) komoditi lobster dan dampak kebijakan pemerintah terhadap sistem komoditi lobster. Tabel PAM disajikan pada Tabel 1 (Rachman et. al., 2004). Nilai pada masing-masing sel dihitung dalam periode satu siklus produksi dalam hal ini satu periode tangkap.

**Tabel 1. *Policy Analysis Matrix* (PAM)**

Uraian	Penerimaan	Biaya		Kuntungan
Harga privat	A	B	C	$D = A - B - C$
Harga sosial	E	F	G	$H = E - F - G$
Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = I - J - K = D - H$

Sumber: Monke and Pearson (1989)

Keterangan: D: keuntungan privat; H: Keuntungan Sosial; I: output Transfer; J: Input Transfer; K: Faktor Transfer dan L: Net Transfer

Dari matriks di atas dapat ditentukan indikator-indikator sebagai berikut (Malian et.al. 2004 dan Rusastra et al.):



## 1. Analisis Keuntungan

### a. *Private Profitability (PP)*: $D = A - (B + C)$

Merupakan indikator daya saing (Competitiveness) dari komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan yang ada. Jika  $D > 0$ , maka usaha lobster layak untuk diusahakan, kecuali jika sumberdaya terbatas atau adanya komoditas lain yang lebih menguntungkan.

### b. *Social Profitability (SP)*: $H = E - (F + G)$

Merupakan indikator keuntungan komparatif (Comparative advantage) dari komoditas lobster pada kondisi tidak ada divergensi harga baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Jika  $H < 0$ , maka komoditas lobster tidak mampu bersaing tanpa adanya intervensi pemerintah.

## 2. Analisis Efisiensi Finansial (keunggulan kompetitif) dan efisiensi Ekonomi (keunggulan komparatif):

### a. *Private Cost Ratio (PCR)* = $C/(A-B)$ :

Indikator profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan komoditas untuk membayar biaya domestik dan tetap kompetitif. Suatu komoditas disebut kompetitif jika nilai  $PCR < 1$ . Makin kecil nilai PCR, berarti makin kompetitif.

### b. *Domestic Resources Cost (DRC)* = $G/(E-F)$ :

Indikator keunggulan komparatif, yang menunjukkan jumlah sumber daya domestik yang dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit devisa. Komoditas memiliki keunggulan komparatif jika  $DCR < 1$ .

## 3. Analisa Dampak kebijakan pemerintah pada Input, output, input dan output

### a. *Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI)* = $B/F$ :

Indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga *input tradable*. Kebijakan bersifat protektif terhadap input tradable jika nilai NPC  $< 1$ . Semakin kecil nilai BPCI, berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap input *tradable* atau ada kebijakan subsidi input *tradable*.

### b. *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)* = $A/E$ :

Indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap output. Kebijakan bersifat protektif terhadap output, jika nilai NPCO  $> 1$ . semakin besar nilai NPCO, berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap output.

### c. *Effective Protective Coefficient (EPC)* = $(A-B)/(E-F)$ :

Indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input *tradable*. Kebijakan bersifat protektif jika nilai EPC  $> 1$ . makin besar nilai EPC, berarti makin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi lobster.

## Pengalokasian Komponen Biaya Domestik dan Asing

Biaya produksi dibedakan menurut input *tradable* dan input domestik. Input *tradable* adalah input yang diperdagangkan di pasar internasional, sedangkan input yang tidak diperdagangkan di pasar internasional dimasukkan ke dalam kelompok input domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan harga privat adalah harga yang dibayarkan oleh nelayan dan harga sosial (harga bayangan) yaitu harga yang terbentuk dalam suatu kondisi perekonomian yang tidak mengalami distorsi. Untuk harga sosial input tradable digunakan harga di pelabuhan (*border price*), yaitu harga *free on board* (FOB) untuk input yang diekspor, dan harga *cost insurance and freinght* (CIF) untuk input yang diimpor. Sedangkan harga sosial input domestik peralatan tangkap lobster dan tenaga kerja digunakan harga yang berlaku seperti yang disarankan oleh Malian *et.al.* (2004)



### ***Pengalokasian Komponen Biaya Domestik***

Pengalokasian komponen biaya ke dalam komponen domestik dan Asing memakai pendekatan langsung. Pendekatan langsung mengasumsikan bahwa seluruh biaya input tradable, baik diimpor maupun produksi domestik dinilai sebagai komponen biaya asing. Dalam penelitian ini barang-barang yang diasumsikan 100 persen domestik adalah kapal, mesin kapal, jaring, jerigen, tali kapal, jangkar, oli, dan tempat penyimpanan lobster. Penentuan biaya tenaga kerja diasumsikan 100 persen domestik mengingat biaya tenaga kerja dibayar dengan sistem bagi hasil atas penerimaan karena tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja *unskilled* yang spesifikasinya berbeda pada sistem perdagangan internasional.

### **Justifikasi Penentuan Harga Sosial Input dan Output**

1. Harga sosial BBM di tingkat nelayan yang digunakan adalah harga BBM yang telah dihilangkan komponen subsidiya. Hal ini didasarkan atas adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pada harga jual BBM domestik.
2. Harga yang digunakan sebagai harga sosial lobster (harga bayangan output) adalah harga FOB, karena posisi Indonesia saat ini sebagai eksportir lobster.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisa profitabilitas**

Dalam bahasan ini, analisa profitabilitas atau analisa keuntungan terdiri dari keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi. Keuntungan finansial merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang dibayarkan oleh nelayan penangkap lobster dimana dasar perhitungan adalah harga lobster yang diterima nelayan dan harga input yang dibayar oleh nelayan. Total biaya meliputi nilai biaya perawatan armada tangkap dan alat tangkap, biaya oprasional, biaya penyusutan dan biaya sewa. Dari hasil analisa didapatkan bahwa usahapenangkapan lobster di Provinsi Bengkulu secara finansial menguntungkan. Kesimpulan ini didasarkan oleh hasil nilai keuntungan privat sebesar Rp. 59.637,- untuk sekali melaut. Keuntungan privat ini merupakan 32,47 % dari total penerimaan privat sekali melaut. Perlu diinformasikan bahwa keuntungan finansial ini diperoleh pada kondisi aplikasi teknologi aktual yang sekarang digunakan oleh nelayan, pada tingkat harga yang dibayar atau diterima oleh nelayan serta kebijakna yang diimplementasikan oleh pemerintah pada saat penelitian dilakukan. Ini berarti, usaha penangkapan lobster di Provinsi Bengkulu mempunyai keuntungan kompetitif yang tinggi secara finansial.

Sementara dalam konteks profitabilitas ekonomi, analisa didasarkan pada kondisi dimana tidak ada kebijakan pemerintah yang diimplementasikan pada usaha penangkapan lobster atau tidak ada distorsi pasar. Akibatnya, harga yang harus dibayar atau diterima oleh nelayan merupakan harga atau biaya imbalan sosial yang sebenarnya (*social opportunity cost*). Jika dilihat dari profitabilitas ekonomi yang mencerminkan keuntungan komparatif, usaha penangkapan lobster memiliki tingkat profitabilitas ekonomi sebesar Rp. 434.839,- atau 74,33 % untuk sekali melaut. Ini berarti dengan mengabaikan adanya segala bentuk subsidi, dan proteksi yang mendistorsi pasar yang dapat mempengaruhi harga, maka dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan lobster di Provinsi Bengkulu juga memiliki tingkat keunggulan komparatif yang tinggi. Tabel 2 berikut menyajikan indikator – indikator daya saing usaha penangkapan lobster di Provinsi Bengkulu.



Tabel 2 Hasil Estimasi Indikator Daya Saing Lobster Bengkulu

No	Indikator	Besaran
1	<i>Analisa Keuntungan</i>	
	a. <i>Finansial (Private Profitability)</i>	59.637
	b. <i>Ekonomi (Social Profitability)</i>	434.839
2	<i>Keunggulan Kompetitif dan Komparatif</i>	
	a. <i>Private Cost Ratio (PCR)</i>	0,63
	b. <i>Domestic Resources Cost (DRC)</i>	0,19
3	<i>Analisa Kebijakan Insentif</i>	
	a. <i>Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI)</i>	0,63
	b. <i>Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)</i>	0,35
	c. <i>Effective Protective Coefficient (EPC)</i>	0,30

Sumber: Hasil Analisa (2009)

### Analisa Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

Usaha penangkapan Lobster di Provinsi Bengkulu menunjukkan tingkat kompetitif yang tinggi. Hal ini dicerminkan oleh indikator PCR yang diperoleh yakni 0,63 (lihat Tabel 2). Nilai ini lebih kecil dari satu yang menginformasikan bahwa Indikator profitabilitas privat ini menunjukkan bahwa sistem usaha penangkapan lobster di Bengkulu memiliki daya saing kompetitif yang tinggi, mampu membayar korbanan biaya domestik yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, keunggulan komparatif usaha penangkapan lobster memberikan nilai rata-rata DRC lebih kecil dari satu, yakni 0,19. Angka ini menunjukkan bahwa usaha penangkapan lobster di Bengkulu memiliki daya saing komparatif yang tinggi dan untuk pengembangan usaha penangkapan lobster di Bengkulu hanya di butuhkan korbanan sumberdaya di dalam negeri yang lebih kecil dari satu rupiah, yaitu Rp. 0,19. Hasil ini seiring dengan temuan Irawan (2009), yang mengukur daya saing dengan pendekatan unit biaya untuk mengukur tingkat daya saing usaha yang diajukan oleh Cockburn and Siggel (1998, 1999). Dengan pendekatan cost unit ini diperoleh bahwa usaha penangkapan lobster memiliki daya saing yang cukup tinggi, yakni 0,56 (Irawan 2009).

### Analisa Kebijakan

Kebijakan pemerintah yang diimplementasikan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha penangkapan lobster dapat berupa insentif input, output dan insentif input-output. Dampak kebijakan pemerintah ini dapat dilihat dari tiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga indikator ini adalah (a) *Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI)*, (b) *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)*, dan (c) *Effective Protective Coefficient (EPC)*. NPCI merupakan ukuran tingkat proteksi pemerintah terhadap input domestik yang digunakan oleh nelayan tangkap. Instrumen pengukuran kebijakan proteksi pemerintah terhadap input yang tercermin dalam nilai NPCI pada usaha penangkapan lobster diperoleh nilai rata-rata NPCI yang lebih kecil dari satu, yakni 0,63. (Tabel 2). Nilai ini dimaknai bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang protektif terhadap nelayan penangkap lobster. Hal ini terlihat dari harga input produksi yang dibayar nelayan cenderung lebih rendah dari harga sosialnya.

Analisa NPCO menginformasikan berapa besar tingkat proteksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap produk lobster domestik. Semakin tinggi (NPCO > 1), semakin tinggi proteksi dari pemerintah terhadap output, yang dalam hal ini adalah lobster. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum nelayan lobster belum menikmati kebijakan



harga output dari pemerintah. Harga jual di tingkat nelayan cenderung lebih rendah dari harga output yang seharusnya (harga sosialnya). Ini tercermin dari nilai indikator NPCO yang lebih kecil dari satu, yaitu 0,35. (Tabel 2). Temuan ini mengindikasikan bahwa produsen domestik menerima harga jual lobster yang jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar internasional. Ini disebabkan karena sebagian besar margin dinikmati oleh pedagang domestik.

Indikator EPC digunakan untuk mengetahui dampak kumulatif kebijakan input tradable dan output. Atau dengan kata lain, EPC menelaah pengaruh bersih dari kebijakan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah dianggap protektif jika nilai EPC lebih besar dari satu atau  $EPC > 1$ . Hasil penelitian diketahui bahwa nilai EPC sebesar 0,3 lebih kecil dari satu (Tabel 2). Angka ini dimaknai bahwa secara umum nelayan lobster tidak memperoleh perlindungan efektif dari pemerintah baik untuk harga input maupun harga output.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan lobster di Provinsi Bengkulu sangat layak diusahakan karena menguntungkan baik dari analisa profitabilitas finansial maupun ekonomi. Ini berarti, jika dipandang dari analisa ini semata, usaha penangkap lobster ini layak untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini juga didukung oleh hasil analisa daya saing kompetitif dan komparatif usaha ini yang cukup tinggi. Daya saing kompetitif yang dicerminkan oleh nilai  $PCR < 1$ , dan daya saing komparatif  $DRC < 1$ . Namun demikian, karena usaha penangkapan lobster merupakan usaha eksploitasi, karena lobster belum mampu dibudidayakan, maka pengusahaan ini harus dilakukan secara hati – hati untuk menjaga profitabilitas dan daya saing usaha ini. Pola – pola *over fishing* perlu dihindari untuk mencegah kepunahan atau mulai menurunnya jumlah dan ukuran (size) dari lobster ini. Beberapa nelayan sudah melaporkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan hasil tangkapannya sizenya lebih kecil dan jumlah tangkapannya menurun. Ini tentunya akan berdampak pada harga yang diterima oleh nelayan, sementara harga input yang dibayar oleh nelayan cenderung mengalami kenaikan.

Lobster adalah komoditi ekspor dan oleh sebab itu tampaknya pemerintah tidak memberikan perlindungan atau proteksi yang cukup terhadap komoditi ini. Hal ini dicerminkan oleh nilai NPCO yang lebih kecil dari satu. Nelayan dipaksa menerima harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah atau mengurangi nelayan melakukan *overfishing*, sebaiknya pemerintah dapat memberikan kebijakan insentif harga output sehingga nelayan dapat menikmati harga yang relatif lebih baik. Kebijakan insentif input yang dinikmati oleh nelayan juga selayaknya dilanjutkan. Hal ini juga akan mendorong nelayan untuk terus dapat berusaha. Insentif input yang dinikmati oleh nelayan adalah bahan bakar minyak (BBM) baik bensin atau solar. Insentif ini sebaiknya juga dibarengi dengan kebijakan untuk menjamin kelancaran ketersediaan input ini di lokasi nelayan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dahny Irawan yang telah membantu terlaksananya dan tersedianya data – data yang diperlukan untuk penelitian lobster di Provinsi Bengkulu serta data – data pendukung lainnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada M. Mustopha Romdhon atas kerjasamanya dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. 2008. *Bengkulu Dalam Angka 2008*. Bengkulu
- Cockburn, J. et al.. 1998 , 'Measuring Competitiveness And Its Sources: The Case Of Mali's Manufacturing Sector', African Economic Policy Paper Discussion Paper No.16
- Cockburn, J. et al.. 1999 'Measuring competitiveness and its sources: the case of Mali's manufacturing sector', Working Paper. CRÉFA: Université Laval.
- DKP Provinsi Bengkulu. 2005. Potensi Perikanan Provinsi Bengkulu
- Irawan, Danny. 2008. *Daya Saing Usaha Pemasaran Lobster di Kota Bengkulu (Studi Kasus UD Edi Koto Bengkulu*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Skripsi (tidak Dipublikasikan.)
- Malian, A. Husni. Benny Rahman dan Adismesra Djulin. 2004. Permintaan Eksport dan Daya Saing Panili di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Agro Ekonomi*. 22(1):26 – 45
- Monke, E.A. and E.S.Pearson. 1995. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development 2th edition*. Cornell University Press. London.
- Rachman, Handewi P.S.; Supriyati; Suprana dan Benny Rahman. 2004. *Efisiensi dan Daya Saing Usahatani Hortikultura*. Dalam Prosiding "Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah 2004" pp. 50 – 82.
- Rusastra, I Wayan, Benny Rahman dan Supena Friyatno. 2004. *Analisa Daya Saing dan Struktur Proteksi Komoditi Palawija*. Dalam Prosiding "Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah 2004" pp. 28 – 49.
- Benny, Rachman dan Tahlim Sudaryanto. 2002. Kemampuan Daya Saing Sistem Usahatani Padi. *Jurnal SOSIO EKONOMIKA*, 8(1): 31-44. Juni 2002, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung.